Mobilitas Masyarakat Tinggi Tanpa Prokes Pasti Naikkan Kasus Covid-19

JAKARTA (IM) - Mobilitas masyarakat yang tinggi tanpa protokol kesehatan (prokes) pasti akan menyebabkan kenaikan kasus Covid-19, seperti yang kejadian puncak gelombang pertama dan kedua Covid-19 di Indonesia.

Lalu, apakah Indonesia akan terjadi gelombang ketiga? Mengingat dalam waktu tiga bulan lagi merupakan libur akhir tahun dimana mobilitas masyarakat biasanya akan tinggi.

"Sebagai epidemiolog kami jarang memprediksi jauh-jauh. Biasanya kita memprediksi satu atau dua kali masa inkubasi, 2 minggu atau 1 bulan," kata Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane secara virtual, dikutip Rabu (29/9).

Masdalina menjelaskan, dari catatan para epidemiolog, pertama penurunan kasus Covid-19 pada saat ini hampir terjadi di semua negara. Penurunan kasus itu berlangsung antara 8 sampai 14 minggu.

"Jadi dia turun sendiri memang," katanya.

"Beberapa komunikasi dengan para ahli virus memang virus tersebut kemungkinan beradaptasi dengan kondisi di negara tersebut," katanya menambahkan.

Kedua, kata Masdalina, kemungkinan virusnya mulai melemah.

"Dan kemungkinan yang ketiga beberapa intervensi yang dilakukan seperti PPKM itu memiliki kontribusi, walaupun kita sulit mengukur kontribusi dari beberapa indikator."

Namun menurut Masdalina, pada kondisi penurunan seperti sekarang ini, masih ada beberapa catatan dari epidemiologi terkait dengan pencapaian Indonesia menurunkan kasus.

Pertama, masih ada selisih atau gap antara kasus yang dilaporkan oleh pemerintah dengan kasus yang ada di lapangan. Selisihnya antara 20 sampai 34%.

Ini harus menjadi catatan. Mestinya tidak boleh terjadi ada gap antara kasus yang ada di lapangan dengan kasus yang dilaporkan secara resmi setiap hari.

Kedua yakni testing. Masdalina mengatakan walaupun testing sudah meningkat dengan cukup signifikan, tetapi dibandingkan dengan suspek testing masih sepertiga sampai setengahnya. Artinya masih cukup banyak suspek yang belum di tes.

Ketiga, kata Masdalina yakni tracing dimana menurut WHO yang menjadi standar di dalam tracing itu adalah persentase kasus konfirmasi yang mampu dilakukan tracing sampai dengan di containment dengan isolasi dan karantina.

"Artinya kalau saat ini kita sudah berada pada level 2, kita harus turunkan kembali transmisi kita ke level 1. Dan kedepannya tidak boleh bolak-balik hanya level 1, 2, 1, 2 atau 2, 3, 2, 3. Tetapi ke depan kita harus turun menuju ke level klaster. Kemudian menurun lagi pada tingkat sporadis dan terus turun sampai dengan nol kasus. Saya kira itu yang harus ditarget bagi pemerintah," ungkap Masdalina.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Indonesia tengah berfokus menuju endemi dari pandemi dengan syarat harus bisa mengendalikan kasus Covid-19.

"Penting saya tekankan, bahwa pembukaan aktivitas sosial-ekonomi bertahap hingga akhirnya mencapai masyarakat yang produktif dan aman Covid-19. Pada masa endemi, tidak akan bisa tercapai apabila modal utama yaitu kepatuhan protokol kesehatan tidak terus dilaksanakan dengan disiplin," ujar Wiku dikutip dari rilis KPCPEN pada Rabu (29/9).

Dalam perkembangan pandemi terkini, meskipun kasus terkendali namun ada sejumlah catatan penanganan dari Satgas COVID-19.

Seperti jumlah pembentukan posko. Padahal, posko melakukan penanganan dengan ruang lingkup yang lebih besar hingga lapisan terkecil.

Sayangnya Satgas posko sebagai wadah koordinasi untuk pengawasan protokol kesehatan hingga tingkat RT/RW belum secara maksimal dimanfaatkan. ● **ber**

IDN/ANTARA

PERKUAT PERSAHABATAN SINGAPURA BERIKAN BANTUAN VAKSIN COVID-19

kepala subdirektorat I Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Fithonatul Mara'ti (kedua kanan) secara simbolis menyerahkan bantuan vaksin COVID-19 dari Pemerintah Singapura kepada Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin (kedua kiri) di Pelabuhan Batuampar, Batam Kepulauan Riau, Senin(29/9). Pemerintah Singapura memberikan bantuan sebanyak 122.400 dosis vaksin AstraZeneca sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Indonesia menangani pandemi COVID-19 serta memperkuat hubungan persahabatan antar kedua negara.

Komnas HAM Ingin Pastikan Perekrutan 56 Pegawai KPK oleh Kapolri Bagian dari Rekomendasi Mereka

Komnas HAM merasa penting penjelasan langsung dari Presiden, apakah perekrutan 56 pegawai KPK untuk jadi ASN Polri merupakan bagian rekomendasi mereka.

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ingin menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi)) untuk memastikan, apakah perekrutan 56 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, untuk dijadikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri, merupakan sikap Presiden Jokowi atas polemik TWK pegawai KPK.

Komnas HAM merasa perlu mendapat kepastian dari Jokowi apakah sikap tersebut diambil dengan berpedoman pada rekomendasi Komnas HAM terkait TWK atau tidak.

"Penting bagi Komnas HAM untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden, apakah ini merupakan bagian dari temuan dan rekomendasi Komnas HAM," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi wartawan, Rabu (29/9).

Lebih lanjut Anam mengatakan, penjelasan itu diperlukan untuk mengetahui jika Jokowi berpedoman dengan menggunakan rekomendasi Komnas HAM, apakah rekomendasi itu dijalankan seluruhnya atau sebagian. Anam mengingatkan jika 56 pegawai KPK itu hendak direkrut ke instansi kepolisian, maka statusnya tetap peralihan menjadi ASN.

"Artinya sistem umum bagi ASN yang melamar tidak boleh diterapkan," ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa temuan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK salah satunya lahir dari proses yang melanggar hukum, terselubung dan ilegal.

"Kondisi ini harus dijadikan konteks dasar dalam kebijakan Presiden," ungkapnya.

Terakhir, Anam menyebutkan bahwa ia tetap menjadikan rekomendasi Komnas HAM sebagai rujukan utama melihat polemik TWK.

"Dan kami berharap mendapat penjelasan langsung Presiden, terkait penjelasan substansi Kapolri," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan merekrut 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk menjadi ASN Polri. Bahkan Kapolri telah mengirimkan surat permohonan pada Presiden Jokowi terkait keinginanya itu.

Jokowi, sambung Listyo, secara prinsip telah menyetujui rencananya itu. Saat ini 56 pegawai diketahui sedang melakukan konsolidasi terkait rencana Listyo itu.

"Kami masih konsolidasi dahulu bersama dengan 56 pegawai lainnya dan semua stakeholder antikorupsi untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini," terang Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif KPK Giri Suprapdiono. ● **han**

MK Tolak Permohonan Uji Materi Pasal 11 UU Tentang Tipikor

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Permohonan uji materi terkait aturan mengenai sanksi pidana suap itu diajukan oleh mantan anggota DPR Patrice Rio Capella yang pernah terjerat kasus korupsi.

"Amar putusan mengadili, menolak pernohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Rabu (29/9).

MK menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai hak atas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 11 UU Tipikor. Dengan demikian, MK menilai dalil pemohon tidak beralasan.

Pasal 11 UU Tipikor tersebut mengatur: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menurut pemohon, frasa "yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sesuai Pasal 28D Ayat 1 UU Dasar 1945.

Patrice juga menilai, ketentuan tersebut ambigu, cenderung bersifat subyektif dan bertentangan dengan sifat dasar dalam hukum pidana. Menurut dia, dalam hukum pidana seseorang tidak dapat dipidana atas apa yang dipikirkan.

"Bahwa dalam hukum pidana seseorang dapat dihukum/dipidana akibat perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, seseorang tidak dapat dihukum/dipidana atas apa yang ia pikirkan," tulis Patrice dalam berkas permohonan. "Berdasarkan hal tersebut maka seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang ia pikirkan, apalagi dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain," kata mantan Sekjen Partai Nasdem itu. ● **han**

PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk DAN ENTITAS ANAK

GRAHA BIP LT. 6
Jl. Gatot Subroto No.Kav. 23, RT.2/RW.2
Karet Semanggi, Setia Budi
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 2522535

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
30 Juni 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	299.474.302.199	278.137.316.828
Deposito Berjangka	15.000.000.000	50.000.000.000
Piutang Usaha:		
- Pihak Ketiga - Bersih	7.704.726.987	9.044.666.038
- Pihak Berelasi - Bersih	4.011.697.170	4.652.193.031
Aset Kontrak	1.064.943.045	397.793.000
Piutang Lain-lain:		
- Pihak Ketiga	5.633.958.449	30.335.421
- Pihak Berelasi	680.916.096	4.706.195.423
Persediaan	616.898.078.602	614.716.473.487
Pajak Dibayar di Muka	8.867.937.740	9.517.465.858
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	5.891.008.516	5.126.386.940
Investasi dalam Instrumen Ekuitas	12.353.625.000	10.414.275.000
Aset Lain-lain	510.576.912	675.669.800
Jumlah Aset Lancar	**978.091.770.716**	**987.418.770.826**
ASET TIDAK LANCAR		
Pajak Dibayar di Muka	503.645.855	-
Tanah untuk Pengembangan	108.280.600.000	108.280.600.000
Investasi dalam Instrumen Ekuitas	21.527.545.432	21.527.545.432
Properti Investasi - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan masing-masing sebesar Rp 135.609.279.657 dan Rp 123.420.683.795 per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	645.027.479.724	657.221.887.859
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan masing-masing sebesar Rp 76.559.033.224 and Rp 73.119.010.480 per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	176.827.060.053	178.028.051.322
Goodwill	22.254.095.400	22.254.095.400
Aset Hak Guna - Bersih	14.125.882.647	14.562.139.695
Dana yang Dibatasi Pengunaannya	116.217.860.301	137.225.099.780
Aset Tidak Lancar Lainnya	7.140.000	7.140.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	**1.104.771.309.412**	**1.139.106.559.488**
JUMLAH ASET	**2.082.863.080.128**	**2.126.525.330.314**

LIABILITAS DAN EKUITAS	30 Juni 2021	31 Desember 2020
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Bank Jangka Pendek	13.591.942.419	15.366.211.392
Utang Usaha - Pihak Ketiga	64.173.188.014	21.316.367.986
Utang Lain-lain:		
- Pihak Ketiga	1.352.031.670	2.502.507.504
- Pihak Berelasi	417.593.461	2.643.511.839
Beban Akrual	10.380.954.073	10.048.499.746
Utang Pajak	1.474.202.916	3.896.956.316
Liabilitas Kontrak	298.512.236.763	303.209.296.818
Setoran Jaminan Penyewa - Jangka Pendek	5.853.114.281	7.084.068.288
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun:		
- Utang Bank	13.432.867.593	11.514.856.638
- Utang Lain-lain - Pihak Ketiga	6.537.054.545	-
- Liabilitas Sewa	357.823.749	857.642.578
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**416.083.009.484**	**378.439.919.105**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun:		
- Utang Bank	452.300.604.102	455.381.563.200
- Utang Lain-lain - Pihak Ketiga	16.755.522.240	17.690.813.626
Setoran Jaminan Penyewa - Jangka Panjang	10.191.061.235	10.248.196.235
Liabilitas Kontrak	18.936.282.648	49.138.665.168
Liabilitas Pajak Tangguhan	1.481.303.500	1.535.037.700
Liabilitas Imbalan Kerja	7.922.724.206	7.147.243.976
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**507.587.497.931**	**541.141.519.905**
Jumlah Liabilitas	**923.670.507.415**	**919.581.439.010**
EKUITAS		
Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		
Modal Saham, Modal Dasar 12.800.000.000 saham yang terdiri dari 1.800.000.000 saham Seri A dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan 11.000.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp 100 per saham per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.638.218.259 saham Seri A per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 3.390.451.117 saham Seri B per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020	1.158.154.241.200	1.158.154.241.200
Tambahan Modal Disetor - Bersih	140.797.315.513	140.797.315.513
Cadangan Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	2.337.260.808	(1.102.989.192)
Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan	6.484.100.952	6.490.553.163
Komponen Ekuitas Lain	63.524.066.545	63.524.066.545
Saldo Rugi	(511.803.266.016)	(510.899.287.330)
Sub Jumlah	**859.493.719.002**	**856.963.899.899**
Kepentingan Non-Pengendali	299.698.853.711	349.979.991.405
Ekuitas - Bersih	**1.159.192.572.713**	**1.206.943.891.304**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**2.082.863.080.128**	**2.126.525.330.314**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020 (Tidak Direviu)
PENDAPATAN	183.896.373.134	337.611.726.780
BEBAN LANGSUNG	(126.599.847.735)	(212.720.089.250)
LABA BRUTO	**57.296.525.399**	**124.891.637.530**
BEBAN USAHA	(24.114.758.368)	(30.449.271.524)
LABA USAHA	**33.181.767.031**	**94.442.366.006**
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Pendapatan Keuangan - Bersih	5.452.452.964	4.485.661.717
Laba Selisih Kurs - Bersih	33.754.632	26.169.894
Beban Keuangan	(24.899.090.739)	(28.036.208.066)
Beban Insentif	-	(318.608.305)
Beban Pajak	(6.712.968)	(23.530)
Rugi Penjualan Obligasi	600.000	-
Laba Penjualan Saham	362.629.400	-
Lain-lain - Bersih	1.811.329.606	2.360.373.510
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	(17.245.037.105)	(21.482.634.780)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL	**15.936.729.926**	**72.959.731.226**
PAJAK FINAL	(6.359.858.816)	(10.128.549.487)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**9.576.871.110**	**62.831.181.739**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
Kini - Non Final	-	(59.537.117)
Tangguhan	53.734.200	(4.567.268)
Jumlah Beban Pajak Penghasilan - Bersih	53.734.200	(64.104.385)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**9.630.605.310**	**62.767.077.354**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	3.440.250.000	(1.251.000.000)
Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Keuntungan (Kerugian) dari Penjabaran Laporan Keuangan	(6.452.211)	2.626.509
Jumlah Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain	3.433.797.789	(1.248.373.491)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**13.064.403.099**	**61.518.703.863**
LABA (RUGI) BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(903.978.686)	31.429.845.970
Kepentingan Non-Pengendali	10.534.583.996	31.337.231.384
Jumlah	**9.630.605.310**	**62.767.077.354**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	2.529.819.103	30.181.472.479
Kepentingan Non-Pengendali	10.534.583.996	31.337.231.384
Jumlah	**13.064.403.099**	**61.518.703.863**
LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**(0,18)**	**6,25**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020 (Tidak Direviu)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari Pelanggan	148.855.381.658	236.147.890.102
Pembayaran kepada:		
Pemasok	(89.335.893.432)	(187.743.939.765)
Direksi dan Karyawan	(11.636.992.103)	(11.389.305.833)
Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**47.882.496.123**	**37.014.644.504**
Penerimaan atas Pendapatan Keuangan	5.456.031.280	5.206.731.017
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	(893.060.790)	1.600.898.963
Pembayaran atas Beban Keuangan	(18.518.361.810)	(26.369.672.057)
Pembayaran Pajak Final	(5.533.821.011)	(2.948.874.935)
Penurunan Dana yang Dibatasi Penggunaannya	21.007.239.479	35.161.167.510
Pembayaran Pajak Penghasilan	(61.236.141)	(1.106.680.389)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**49.339.287.130**	**48.558.214.613**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Peningkatan Tanah untuk Pengembangan	-	(2.778.230.000)
Penambahan Aset Tetap	(2.118.321.475)	(100.188.125)
Penambahan Properti Investasi	(114.897.727)	-
Penerimaan dari Penjualan Investasi dalam Instrumen Ekuitas	8.298.929.400	-
Peningkatan Investasi dalam Instrumen Ekuitas	(6.436.000.000)	(4.500.900.000)
Pencairan Deposito Berjangka	35.000.000.000	-
Penerimaan Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi	3.980.168.124	(960.289.891)
Pembayaran Dividen kepada Kepentingan Non Pengendali	(60.815.721.690)	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(22.205.843.368)**	**(8.339.608.016)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari Pinjaman Bank	1.893.608.524	40.580.000.000
Pembayaran Pinjaman Bank	(4.957.877.497)	(6.653.264.972)
Penerimaan dari Setoran Modal	-	3.800
Pembayaran Utang Pihak Berelasi	(2.225.918.378)	(34.912.878.446)
Pembayaran Liabilitas Sewa	(499.818.829)	(421.076.131)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(5.790.006.180)**	**(1.407.215.749)**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	21.343.437.582	38.811.390.848
DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	(6.452.211)	-
KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAHUN	**278.137.316.828**	**196.029.873.433**
KAS DAN SETARA KAS, AKHIR TAHUN	**299.474.302.199**	**234.841.264.281**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Saldo Rugi	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi atas Perubahan Cadangan Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan	Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah	Kepentingan Non-Pengendali	Ekuitas-Bersih
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	**1.158.154.237.400**	**140.797.315.513**	**(561.415.900.094)**	**(3.448.614.192)**	**6.503.139.910**	**63.524.066.545**	**804.114.245.082**	**312.574.741.640**	**1.116.688.986.722**
Pencatatan dari Konversi Waran Seri III	3.800	-	-	-	-	-	3.800	-	3.800
Laba Bersih (Tidak Direviu)	-	-	31.429.845.970	-	-	-	31.429.845.970	31.337.231.384	62.767.077.354
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain	-	-	-	1.251.000.000	2.626.509	-	(1.248.373.491)	-	(1.248.373.491)
Penerbitan Saham Entitas Anak Baru	-	-	-	-	-	-	-	612.500.000	612.500.000
SALDO PER 30 JUNI 2020 (Tidak Direviu)	**1.158.154.241.200**	**140.797.315.513**	**(529.986.054.124)**	**(4.699.614.192)**	**6.505.766.419**	**63.524.066.545**	**834.295.721.361**	**344.524.473.024**	**1.178.820.194.385**
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	**1.158.154.241.200**	**140.797.315.513**	**(510.899.287.330)**	**(1.102.989.192)**	**6.490.553.163 -**	**63.524.066.545**	**856.963.899.899**	**349.979.991.405**	**1.206.943.891.304**
Laba (Rugi) Bersih	-	-	(903.978.686)	-	-	-	(903.978.686)	10.534.583.996	9.630.605.310
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain	-	-	-	3.440.250.000	(6.452.211)	-	3.433.797.789	-	3.433.797.789
Pembagian Dividen Kas Entitas Anak kepada Pihak Non-Pengendali	-	-	-	-	-	-	-	(60.815.721.690)	(60.815.721.690)
SALDO PER 30 JUNI 2021	**1.158.154.241.200**	**140.797.315.513**	**(511.803.266.016)**	**2.337.260.808**	**6.484.100.952**	**63.524.066.545**	**859.493.719.002**	**299.698.853.711**	**1.159.192.572.713**

Catatan :

1. Informasi keuangan diatas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah direviu oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian, dalam laporannya tertanggal 25 Agustus 2021.
2. Laba per saham dihitung berdasarkan laba tahun berjalan konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

Jakarta, 30 September 2021

PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk

DIREKSI